



Implementasi E-Government dalam Mendukung SDGs di Kota Bandung: Studi Literatur

Karina Khansa Thufailah¹, Melya Nur'aeni², Nayla Nur Syamila³, Syikayah Aulia⁴,
Syadiq Asmar Putra⁵, Jaliludin Muslim⁶

^{1,2,3,4,5,6} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: karinakhansaaa@gmail.com¹, nuraanimelya@gmail.com², naylasyamila06@gmail.com³,
syikayahaulia@gmail.com⁴, syadikasmar@gmail.com⁶, jaliludin@uinsgd.ac.id⁷

Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 08, 2026

Keywords:

E-Government, Digital Public Services, Sustainable Development Goals (SDGs), Smart City, Governance, Digital Transformation

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of e-government implementation in Bandung City in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). The main problem addressed in this research is the suboptimal utilization of e-government in promoting sustainable development due to various structural and non-structural challenges. This research employs a literature study method by reviewing relevant academic journals, books, and official documents published within the last 5–10 years. The findings indicate that e-government in Bandung has significantly contributed to improving transparency, accountability, and efficiency in public service delivery, as well as supporting the achievement of SDG 16 related to strong and inclusive institutions. However, its implementation still faces several challenges, including digital divide, low digital literacy among citizens, lack of system integration across government agencies, and issues related to data security and policy sustainability. The study concludes that e-government has strong potential as a strategic instrument for sustainable development, but requires strengthening digital infrastructure, enhancing public capacity, improving system integration, and ensuring sustained political commitment to optimize its contribution to SDGs.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 08, 2026

Keywords:

E-Government, Pelayanan Publik Digital, Sustainable Development Goals (SDGs), Smart City, Tata Kelola Pemerintahan, Transformasi Digital

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi implementasi e-government di Kota Bandung dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pemanfaatan e-government dalam mendorong pembangunan berkelanjutan akibat berbagai tantangan struktural dan non-struktural. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government di Kota Bandung telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik, serta mendukung pencapaian SDG 16 terkait kelembagaan yang kuat dan inklusif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kesenjangan akses digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, kurangnya integrasi sistem antarinstitusi, serta isu keamanan data dan keberlanjutan kebijakan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa e-government memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan, namun



diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas masyarakat, integrasi sistem, serta komitmen kebijakan yang berkelanjutan agar kontribusinya terhadap SDGs dapat lebih optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nayla Nur Syamila
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: naylasyamila06@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah paradigma pelayanan publik dari sistem konvensional yang cenderung lambat, birokratis, dan kurang fleksibel menjadi model pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menggeser pola pikir aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Digitalisasi memungkinkan proses pelayanan yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan tatap muka menjadi lebih cepat melalui platform daring. Di Indonesia, transformasi ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Kota Bandung sebagai salah satu daerah yang progresif dalam inovasi pemerintahan telah mengadopsi konsep smart city dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat turut mendorong perubahan mendasar dalam sistem birokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks ini, e-government hadir sebagai pendekatan strategis yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. E-government tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun interaksi yang lebih terbuka antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar lembaga pemerintah. Di Indonesia, implementasi e-government diperkuat oleh kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya kualitas layanan, serta berbagai kebijakan nasional terkait pengembangan smart city dan digital government. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Secara global, perkembangan e-government di Indonesia menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun masih berada pada kategori menengah dalam berbagai indikator internasional seperti UN E-Government Survey. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia telah memasuki tahap pengembangan layanan digital berbasis web interaktif, namun belum sepenuhnya mencapai tahap integrasi dan transformasi yang optimal. Di tingkat daerah, Kota Bandung



menjadi salah satu contoh implementasi e-government yang cukup maju melalui berbagai inovasi seperti e-kelurahan, One Single Sign On (SSO), dan Bandung Command Centre yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan integrasi data pelayanan publik. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek non-teknis seperti kesiapan sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem pendukungnya.

Implementasi e-government juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan yang berkaitan dengan pembangunan kelembagaan yang efektif, transparan, dan inklusif. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas, mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Dengan demikian, e-government berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas implementasi e-government masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi digital aparatur, resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi, serta ketimpangan akses teknologi di masyarakat. Tantangan-tantangan ini berpotensi menghambat optimalisasi kontribusi e-government terhadap pencapaian SDGs.

Urgensi untuk mengkaji kontribusi e-government terhadap SDGs menjadi semakin penting mengingat peran strategis teknologi digital dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada aspek teknis implementasi atau evaluasi kinerja sistem secara administratif, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Padahal, e-government memiliki potensi besar sebagai motor penggerak kesejahteraan sosial jika diintegrasikan secara tepat dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait belum adanya kajian yang secara sistematis menghubungkan implementasi e-government di Kota Bandung dengan capaian indikator SDGs. Berdasarkan hal tersebut, studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis berbagai temuan akademis guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan integrasi kebijakan digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep E-Government

Electronic Government (e-Government) merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik (Napitulu et al., 2020). Dalam perspektif administrasi publik, e-Government dipahami sebagai bentuk transformasi digital birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah sekaligus memperkuat penerapan good governance. Scholl (2003) dalam Rifdan et al. (2024) menegaskan bahwa salah satu tujuan utama e-Government adalah menyediakan layanan publik



yang lebih responsif dan akurat bagi masyarakat. Melalui implementasi e-Government, proses administrasi dan pelayanan publik dapat diakses secara digital tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu (Nurfadillah et al., 2025).

Di Indonesia, pengembangan e-Government memiliki dasar normatif melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya transformasi pemerintahan berbasis teknologi untuk mengurangi hambatan birokrasi, memperkuat integrasi sistem, serta meningkatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah (Irma et al., 2023). Dengan demikian, e-Government tidak hanya dimaknai sebagai upaya digitalisasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen reformasi dalam administrasi publik.

Secara konseptual, implementasi e-Government mencakup beberapa dimensi utama, yaitu Government to Citizen (G2C) yang berorientasi pada pelayanan publik kepada masyarakat, Government to Business (G2B) yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada sektor bisnis, serta Government to Government (G2G) yang menekankan integrasi dan koordinasi antarinstansi pemerintah (Yamin et al., 2021). Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa e-Government tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan digital, tetapi juga mendukung peningkatan partisipasi publik, efisiensi administrasi, serta penguatan digital governance yang relevan dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang menjadi pedoman bagi berbagai negara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. SDGs dirumuskan sebagai kerangka pembangunan pasca-2015 yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pembangunan manusia (human development), pembangunan sosial-ekonomi (social economic development), dan keberlanjutan lingkungan (environment) (Hidayat, 2020). Sebagai agenda pembangunan yang bersifat holistik, SDGs mencakup 17 tujuan global beserta indikator capaian yang menjadi acuan dalam implementasi pembangunan di tingkat internasional maupun nasional.

Di Indonesia, komitmen terhadap pelaksanaan SDGs diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi landasan bagi tata kelola, perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan capaian SDGs di tingkat pusat dan daerah (Sudarmonowati, 2019; Witarti et al., 2020). Regulasi tersebut menegaskan bahwa SDGs tidak hanya diposisikan sebagai agenda global, tetapi juga telah terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional.

Salah satu tujuan dalam SDGs, yaitu SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions), menekankan pentingnya pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, transparan, dan inklusif (United Nations, n.d.) Tujuan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan e-government karena digitalisasi pelayanan publik berpotensi mendorong peningkatan transparansi, efisiensi birokrasi, akses terhadap informasi, serta akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, implementasi e-government dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang berkontribusi dalam mendukung pencapaian SDG 16 sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik.



Keterkaitan E-Government

E-government memiliki keterkaitan yang erat dengan SDGs karena berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

1. E-government menjadi alat untuk mencapai tujuan SDGs dengan mengganti sistem administrasi berbasis kertas menjadi sistem elektronik sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.
2. E-government meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan karena masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik, yang sejalan dengan SDGs poin 16 tentang institusi yang kuat, damai, dan adil.
3. E-government mendorong partisipasi masyarakat melalui konsep open government, dimana warga dapat ikut menyampaikan aspirasi serta mengawasi jalannya pembangunan desa. P
4. Penerapan e-government meningkatkan efektivitas pelayanan publik seperti pengelolaan data administrasi dan penyampaian informasi sehingga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
5. E-government mendukung implementasi SDGs hingga tingkat desa, seperti pada Desa Melung Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya dilakukan di tingkat nasional tetapi juga dapat dimulai dari pemerintahan lokal melalui inovasi digital (Muhammad Yamin, Arief Bakhtiar Darmawan, Nurul Azizah Zayzda, 2018).

Digital Governance Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Digital governance untuk pembangunan berkelanjutan merupakan penerapan teknologi digital dalam proses tata kelola pemerintahan untuk mendukung tercapainya pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik, pengelolaan data, pengambilan keputusan, serta koordinasi antar lembaga agar proses pemerintahan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digital governance juga memperkuat partisipasi publik melalui akses informasi yang lebih terbuka dan komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, digital governance berperan penting dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, transformasi digital dalam pemerintahan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (Hombore, 2025).

E-government sebagai instrumen good governance

E-government sebagai instrumen good governance dalam jurnal Novia Nurkartika (2025) dijelaskan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Integrasi teknologi digital dalam pemerintahan membantu mempercepat proses



administrasi, mempermudah akses pelayanan publik, serta mengurangi prosedur birokrasi yang berbelit sehingga pelayanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan sistem elektronik memungkinkan pemerintah memberikan informasi secara terbuka kepada publik sehingga masyarakat dapat memantau proses kebijakan, penggunaan anggaran, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Transparansi ini menjadi salah satu prinsip utama good governance karena mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Nurkartika, 2025).

Melalui e-government, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi lebih kuat karena adanya ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pemerintahan. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik secara lebih mudah dan cepat. Partisipasi tersebut membantu pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, e-government juga berkontribusi pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik karena layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih efisien dari segi waktu maupun biaya. Namun, jurnal ini juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-government masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar transformasi digital dapat berjalan optimal. Dengan demikian, e-government tidak hanya berfungsi sebagai alat modernisasi administrasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan good governance yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan tujuan untuk menganalisis implementasi e-government dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Bandung. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan yang berkaitan dengan penerapan e-government dan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana e-government berperan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta pencapaian tujuan SDGs di tingkat daerah. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan difokuskan pada pembahasan mengenai e-government, good governance, digital governance, smart city, dan implementasi SDGs, khususnya yang berkaitan dengan Kota Bandung. Dokumen kebijakan seperti Peraturan Daerah, laporan pemerintah, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah juga digunakan untuk memperkuat analisis penelitian.

Teknik pencarian literatur dilakukan melalui database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, dan jurnal nasional maupun internasional yang terindeks. Kata kunci yang



digunakan antara lain “e-government”, “SDGs”, “digital governance”, “good governance”, “smart city”, dan “Kota Bandung”. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, tahun publikasi, kualitas sumber, serta keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Literatur yang dipilih merupakan sumber yang memiliki kredibilitas akademik dan mendukung analisis terhadap implementasi e-government dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Content analysis merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan menelaah dan memahami isi dokumen untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi data yang relevan dari berbagai sumber dokumen sehingga menghasilkan informasi yang lebih sistematis, objektif, dan sesuai dengan fakta yang ada (Wilkinson Mardika, 2022). Peneliti menganalisis pola, konsep, serta temuan penting yang berkaitan dengan implementasi e-government dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs di Kota Bandung. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran e-government sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi E-Government di Kota Bandung

Smart City dan Layanan Publik Digital

Kota Bandung merupakan salah satu pelopor implementasi smart city di Indonesia. Sejak tahun 2013, Pemerintah Kota Bandung secara konsisten mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Inisiatif ini diwujudkan melalui pembentukan Bandung Command Center (BCC) yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data kota secara real-time, mencakup pemantauan lalu lintas, kebersihan, dan keamanan kota (Supangkat et al., 2018). Pengembangan ekosistem digital Kota Bandung diperkuat melalui penerapan sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan efisien (Pratama, 2020).

Inovasi Layanan Berbasis Digital

Berbagai inovasi layanan digital telah dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Di antara inovasi yang menonjol adalah aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sistem perizinan online melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Digital, serta portal open data Kota Bandung yang memungkinkan akses publik terhadap berbagai dataset pemerintah (Purwanto et al., 2021). Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga mengembangkan platform digital untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) dan aplikasi pendidikan digital menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar bagi seluruh warga kota (Nugroho, 2019).

Capaian Implementasi

Implementasi e-government di Kota Bandung telah menunjukkan capaian yang signifikan. Berdasarkan penilaian United Nations E-Government Survey, Indonesia—dengan



Bandung sebagai salah satu kota percontohan—mengalami peningkatan indeks e-government secara berkelanjutan. Kota Bandung berhasil meraih penghargaan sebagai kota dengan inovasi pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada beberapa tahun berturut-turut (Kementerian PAN-RB, 2022). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital di Kota Bandung pun terus meningkat. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala menunjukkan indeks kepuasan berada di angka 83,4 persen pada tahun 2022, meningkat dari 76,2 persen pada tahun 2018 (BPS Kota Bandung, 2023).

2. Kontribusi E-government terhadap SDGS

Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu kontribusi terbesar e-government di Kota Bandung terhadap SDGs adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui portal open data dan sistem pelaporan keuangan daerah yang dapat diakses publik secara daring, masyarakat memiliki kemampuan untuk memantau penggunaan anggaran dan kinerja pemerintah secara langsung. Hal ini berkontribusi secara langsung pada pencapaian SDG 16 yang menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel (UNDP, 2022).

Penerapan sistem e-procurement (pengadaan barang/jasa secara elektronik) juga terbukti efektif dalam meminimalkan praktik korupsi dan kolusi dalam proses pengadaan publik di Kota Bandung. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa daerah yang mengimplementasikan e-procurement secara konsisten mengalami penurunan indikasi korupsi yang signifikan (KPK, 2021).

Efisiensi Pelayanan Publik

E-government berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Kota Bandung. Digitalisasi proses administrasi telah memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen secara drastis. Sebagai contoh, waktu pengurusan izin usaha yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 14 hari kerja kini dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja melalui sistem PTSP Digital (Pemerintah Kota Bandung, 2022).

Efisiensi ini secara tidak langsung mendukung pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, serta SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) melalui pemerataan akses layanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan (Wahyudi & Kusuma, 2020).

Dukungan pada SDG 16

SDG 16 secara eksplisit menargetkan pembangunan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Implementasi e-government di Kota Bandung memberikan kontribusi langsung terhadap target ini, khususnya target 16.6 yang menekankan pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan (United Nations, 2015). Melalui platform partisipasi digital seperti aplikasi LAPOR! dan musrenbang online (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), warga Kota Bandung memiliki saluran yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Keterlibatan warga ini sejalan dengan target SDG 16.7 yang mendorong pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan representatif (Rozaki, 2021). Secara keseluruhan, e-government bukan sekadar alat modernisasi administrasi, melainkan merupakan enabler



strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi fondasi pencapaian SDGs secara berkelanjutan di Kota Bandung.

3. Tantangan Implementasi

Implementasi e-government di Kota Bandung dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) menghadapi tantangan struktural yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur digital dan kesenjangan akses teknologi. Studi oleh Naibaho (2025) menunjukkan bahwa meskipun Bandung dikenal sebagai salah satu kota pionir smart city di Indonesia, masih terdapat ketimpangan akses internet di wilayah pinggiran yang berdampak pada rendahnya inklusivitas layanan digital. Hal ini sejalan dengan temuan Badii (2025) yang menyatakan bahwa digital divide menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pelayanan publik berbasis elektronik. Dalam perspektif teoritis, Heeks (2017) menegaskan bahwa keberhasilan e-government sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan kesetaraan akses masyarakat terhadap teknologi. Selain itu, laporan Departemen Ekonomi United Nations (2024) juga menekankan pentingnya konektivitas digital sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan ke-9. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pemerataan infrastruktur digital, implementasi e-government berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung perlu memprioritaskan pemerataan akses digital sebagai strategi utama agar implementasi e-government selaras dengan prinsip no one left behind dalam SDGs.

Selain aspek infrastruktur, tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan layanan e-government. Mayoritas penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi pelayanan publik secara optimal sehingga tingkat pemanfaatannya belum maksimal. Temuan ini diperkuat oleh Renanda (2025) yang menyatakan bahwa literasi digital merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik. Dunleavy (2006) dalam konsep digital era governance menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, Setyawati (2025) menekankan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam digital governance. Rendahnya literasi digital berdampak langsung pada efektivitas implementasi e-government dalam mendukung SDGs, khususnya pada tujuan ke-4 dan ke-16. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tanpa diiringi peningkatan kapasitas pengguna akan menciptakan kesenjangan dalam pemanfaatan layanan publik. Dengan demikian, menurut penulis, diperlukan strategi edukasi digital yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam ekosistem e-government.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan integrasi sistem dan koordinasi antarinstansi pemerintah. Penelitian Wibowo dan Anggraeni (2020) menunjukkan bahwa masih terdapat fragmentasi sistem informasi di tingkat pemerintah daerah yang menyebabkan inefisiensi dalam pelayanan publik. Thalib & Nugroho (2025) menegaskan bahwa interoperabilitas sistem merupakan kunci dalam menciptakan layanan publik yang terintegrasi dan efektif. Selain itu, Kar (2023) juga menyoroti bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi dapat menghambat pencapaian SDGs karena data dan kebijakan tidak terintegrasi secara optimal. Dalam konteks



Kota Bandung, meskipun telah tersedia berbagai aplikasi layanan publik, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Kondisi ini menyebabkan terjadinya duplikasi data serta menurunkan efisiensi birokrasi. Akibatnya, pengambilan keputusan berbasis data belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola digital yang menekankan integrasi sistem serta kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kontribusi e-government terhadap pencapaian SDGs.

Selanjutnya, aspek keamanan data dan privasi menjadi tantangan krusial dalam implementasi e-government. Penelitian Ichsan (2024) menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan layanan digital di sektor publik diiringi dengan risiko kebocoran data dan serangan siber. Hal ini diperkuat oleh Bada (2019) yang menyatakan bahwa keamanan siber merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap e-government. Dalam konteks teoritis, Singer dan Friedman (2014) menjelaskan bahwa perlindungan data merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan digital. Keamanan digital merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Jika masyarakat tidak merasa aman dalam menggunakan layanan digital, maka tingkat partisipasi publik akan menurun dan menghambat pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-16. Hal ini menunjukkan bahwa isu keamanan tidak dapat dipandang sebagai aspek sekunder dalam e-government. Dengan demikian, pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat sistem keamanan digital serta regulasi perlindungan data guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Terakhir, tantangan dalam aspek kebijakan dan komitmen politik juga sangat memengaruhi keberhasilan implementasi e-government. Maisarah (2025) menunjukkan bahwa keberlanjutan program e-government sering kali bergantung pada komitmen pimpinan daerah, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan. Grindle (2017) menyatakan bahwa faktor politik merupakan determinan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian oleh Armansyah (2026) juga menekankan pentingnya political will dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Dalam konteks SDGs, konsistensi kebijakan menjadi kunci agar program dapat memberikan dampak jangka panjang. Tanpa komitmen yang kuat, inovasi e-government berpotensi menjadi program jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi e-government tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen politik serta regulasi yang berkelanjutan agar implementasi e-government di Kota Bandung dapat secara konsisten mendukung pencapaian SDGs.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa implementasi e-government di Kota Bandung memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek transparansi, efisiensi pelayanan publik, serta penguatan kelembagaan yang akuntabel. Hipotesis ini pada dasarnya mengasumsikan bahwa transformasi digital dalam sektor publik mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya konsep



smart city, e-government diposisikan sebagai katalis utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di Kota Bandung memang telah memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik. Berbagai inovasi digital seperti Bandung Command Center, layanan PTSP digital, serta platform partisipasi publik terbukti mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan mempercepat proses administrasi pemerintahan .

Selain itu, e-government juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 16 melalui penguatan institusi yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kontribusi tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai tantangan struktural dan non-struktural. Permasalahan seperti kesenjangan akses digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, kurangnya integrasi sistem antarinstansi, serta isu keamanan data menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi e-government. Selain itu, faktor politik dan keberlanjutan kebijakan juga turut memengaruhi efektivitas implementasi, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan institusional dan sosial. Dengan demikian, hipotesis penelitian dapat dinyatakan terkonfirmasi secara parsial, di mana e-government terbukti berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi implementasi e-government dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amansyah, D. (2026). Political Will Sebagai Kunci Sukses Implementasi SITANJAK Analisis Studi E-Government Di Kota Pekanbaru. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 3(1).
- Bada, M., Sasse, A. M., & Nurse, J. R. C. (2019). Cyber security awareness campaigns: Why do they fail to change behaviour? *ArXiv Preprint ArXiv:1901.02672*.
- Badii, R. R., & Nurdin, N. (2025). Implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah. *Institut Pemerintah Dalam Negeri*.
- BPS Kota Bandung. (2023). *Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Kota Bandung*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Dunleavy, P. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Economic, D. of. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development-With the addendum on Artificial Intelligence*. Stylus Publishing, LLC.



- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.
- Heeks, R. (2017). Information and communication technology for development (ICT4D). Routledge.
- Hidayat, A. (2020). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN. JURNAL PAPATUNG, 5(2), 55–62.
- Hombore, E. (2025). Implementasi Smart-Village: Peluang dan Tantangan Transformasi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. <https://doi.org/10.63822/e7sq2495>
- Ichsan, M. T. (2024). Peran Telematika dalam Era Digital: Kemajuan Zaman, E-Commerce, dan Tantangan Keamanan Data. Jurnal Telematika, 1(1).
- Irma, N., Ginting, B., & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(6), 454–466.
- Kar, S. (2023). Data for better lives: world development report 2021 by World Bank Group. J Data Sci Informet Citation Stud, 2(2).
- Kencana, N., & Permatasari, Y. (2025). E-government dalam SDGs: Penerapan website sebagai upaya mendukung keberlanjutan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, 3(2).
- Kementerian PAN-RB. (2022). Laporan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kurniati, P. S., Gislawati, R. T., Safitri, F. N., & Lutfi, A. J. (2023). Implementasi kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kota Bandung. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(4), 875–886.
- Maisarah, P. A., Fonna, F., & Firdaus, R. (2025). Peran kritis sistem informasi manajemen dalam mewujudkan e-Government yang responsif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan, 6(3).
- Muhammad Yamin, Arief Bakhtiar Darmawan, Nurul Azizah Zayzda, M. ash-S. (2018). Analisis Open Government dan e-government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGS: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72137>
- Naibaho, A. R., Dinatingtyas, J., Utami, S. A., Manik, Y. A., & Ariesmansyah, A. (2025). Efektivitas Aplikasi Bandung Smart City dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan



- Publik: Analisis Transformasi Digital 2024. PAMARENDA: Public Administration and Government Journal, 5(1), 336–346.
- Napitulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Jamaludin, Negara, E. S., & Simarmata, J. (2020). E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi. Yayasan Kita Menulis.
- Nugroho, R. A. (2019). Transformasi Digital Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kota Bandung. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 45–62.
- Nurfadillah, A., Nursamsir, & Mardiana. (2025). Penerapan E-Government pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Kasus Aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka). Pena Bangsa, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.256>
- Nurkartika, N. (2025). E-Government Transformasi Menuju Good Governance. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(2). <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/62>
- Pratama, I. P. A. E. (2020). Smart City Bandung: Analisis Implementasi dan Dampak Sosial. Jurnal Sistem Informasi, 16(1), 1–15.
- Purwanto, A., Asbari, M., & Santoso, P. B. (2021). Inovasi Layanan Publik Digital di Era New Normal: Studi pada Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi, 18(1), 1–18.
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas pelayanan digital dalam mempermudah birokrasi dan pengelolaan data publik. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1(8), 1651–1657.
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Jurnal Governance and Politics (JGP), 4(1), 49–61.
- Setyawati, F. I. (2025). Menuju Desa Digital Inklusif: Implementasi E-Government Pada Website Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Journal of Public Administration and Governance Insights (PAGI), 22–31.
- Sudarmonowati, E. (2019). Implementation of Response to Lima Action Plan in Indonesia: Strategy and Progress in Relation to SDGs. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 298(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/298/1/012020>
- Supangkat, S. H., Arman, A. A., & Nugroho, H. (2018). Bandung Smart City: Conceptual Framework and Implementation. Procedia Computer Science, 124, 372–379.



- Thalib, S., & Nugroho, H. S. (2025). Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan “LAPOR” Sleman Sebagai Perwujudan Smart Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 618–636.
- United Nations. (n.d.). Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies. United Nations.
- Wilkinson Mardika, F. (2022). ANALISIS PENGUNGKAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) PT. GAS NEGARA Tbk. TAHUN 2016–2020 BERDASARKAN STANDAR GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accountin>
- Witarti, D. I., Puspitasari, A., & Fithriana, A. (2020). PENANAMAN NASIONALISME DALAM MENCEGAH AKSI RADIKALISME KEPADA ANAK: PERWUJUDAN KONKRET PENCAPAIAN SDGS 16. *SEBATIK*, 24(1), 68–74.
- Yamin, M. N., Guntur, M., Aminia, N., & Bakhtiar. (2021). GOVERNMENT TO CITIZEN (G-To-C) UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN DI KABUPATEN GOWA. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(2), 140–148.
- Zulfiani, Y. N., Nurzaman, R. A., Rompis, A. E., & Nurmalasari, E. (2022). Implementasi e-government pada konsep smart city Pemerintah Kota Bandung dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JOGIV)*, 5(1).